



### Otonomi Kerajaan Denpasar dalam Perspektif Sejarah: Diplomasi, Perjuangan dan Kontribusinya Bagi Bangunan Negara-Bangsa

*The Autonomy of Denpasar Kingdom in the Context of Diplomatic History, Struggle and Its Contribution to the Nation -State Building*

**I Dewa Gde Windhu Sancaya, I Ketut Ardhana**

Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia

email: [windhusancaya@yahoo.com](mailto:windhusancaya@yahoo.com), [phejepsdrilipi@yahoo.com](mailto:phejepsdrilipi@yahoo.com)

#### **Info Artikel**

Masuk: 21 Mei 2024

Revisi: 4 Juli 2024

Diterima: 15 Juli 2024

Terbit: 31 Agustus 2024

**Keywords:** Denpasar Kingdom; autonomy; diplomacy; struggle and the nation-state building

**Kata kunci:** Kerajaan Denpasar; Otonomi; diplomasi; perjuangan dan pembangunan Negara Bangsa

#### **Corresponding Author:**

I Ketut Ardhana,

email:

[phejepsdrilipi@yahoo.com](mailto:phejepsdrilipi@yahoo.com)

#### **DOI:**

<https://doi.org/10.24843/JH.2024.v28.i03.p10>

#### **Abstract**

*The kingdom of Denpasar, previously called the kingdom of Badung as well was a cultural entity which played an significant role not only in the past, but also still be seen in the modern Bali era. It is not surprising to see that the existence of this kingdom cannot be separated from the understanding of the existence of autonomy, diplomacy and the struggles and its contribution that has been carried out from the past until now. There are some significant questions that will be addressed in this paper firstly: What and how did the kingdom or Puri Denpasar exist in the dynamics of society and culture in Bali in particular and in Indonesia in general? Secondly: how did collective memory develop so that Puri Denpasar had its authority as the diplomacy and struggle carried out to contribute to the nation-state building? Thirdly: what the meaning of kingdom in the modern Bali era particularly in the context of socio and cultural aspects so that these social and cultural values can be maintained regarding its existence from the past until now within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia? These are some significant questions that will be discussed in this study in an effort to have a better understanding about the role of the kingdom or Puri Denpasar in socio-cultural, economic and political aspects so that Puri Denpasar can maintain its existence until now in the context of nation-state building in the modern Indonesian state.*

#### **Abstrak**

*Kerajaan Denpasar yang dulu disebut Kerajaan Badung juga merupakan sebuah entitas kebudayaan yang mempunyai peranan penting tidak hanya pada masa lampau, namun masih dapat dilihat pada masa Bali modern. Tak heran jika keberadaan kerajaan ini tidak lepas dari pemahaman akan keberadaan otonomi, diplomasi dan perjuangan serta kontribusinya yang telah dilakukan sejak dulu hingga saat ini. Ada beberapa pertanyaan penting yang akan dijawab dalam tulisan ini pertama: Apa dan bagaimana keberadaan kerajaan atau Puri Denpasar dalam dinamika masyarakat dan kebudayaan di Bali pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya? Kedua: bagaimana memori kolektif berkembang sehingga Puri Denpasar mempunyai wibawa sebagai diplomasi*

---

*dan perjuangan yang dilakukan untuk berkontribusi dalam pembangunan negara bangsa? Ketiga: apa makna kerajaan di era Bali modern khususnya dalam konteks sosial budaya agar nilai-nilai sosial budaya tersebut dapat tetap terjaga keberadaannya dari dulu hingga sekarang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia?. Itulah beberapa pertanyaan penting yang akan dibahas dalam penelitian ini dalam upaya untuk lebih memahami tentang peran kerajaan atau Puri Denpasar dalam aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik agar Puri Denpasar dapat mempertahankan eksistensinya hingga saat ini di dunia. konteks pembangunan negara bangsa dalam negara Indonesia modern.*

---

## PENDAHULUAN

Dinamika sejarah Bali pada khususnya dan sejarah Indonesia pada umumnya memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaannya sebagaimana terjadi juga pada dinamika sejarah di kawasan Asia Tenggara lainnya. Secara geografis memang kerajaan-kerajaan itu memiliki perbedaan-perbedaan, namun tidak dapat disangkal bahwa masyarakat dan budaya di kerajaan-kerajaan itu memiliki kemiripan. Ini tercermin dari adanya pandangan yang melihat kawasan di kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara sebagai sebuah satu kesatuan unit sosial (*one social unit*) dalam kaitannya adanya kesamaan struktur sosial masyarakat yang dipengaruhi dua pengaruh budaya besar baik dari Tiongkok maupun dari India (Baca: Anthony Reid, 1988, lihat juga Creese, 1992 dan 1993). Inilah argumentasi yang mengisyaratkan bahwa adanya kemiripan dinamika sejarah di kawasan Asia Tenggara pada umumnya.

Tidak mengherankan, jika berbicara masalah otonomi kerajaan-kerajaan di Bali pada khususnya tidaklah pula berbeda dengan otonomi kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara terutama pada abad ke-17 dan abad ke-18. Kerajaan Denpasar di Bali misalnya juga memiliki otonominya dalam arti luas yang tidak hanya mencakup aspek sosial budaya (Anderson: 1972, *passim*), tetapi juga aspek ekonomi dan politik. oleh karena itu ketika membahas akar-akar bangunan negara bangsa di masa lalu, sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pemahaman dinamika sejarah pada periode tradisional kemudian berlanjut pada periode kolonial hingga memasuki masa modernnya (Gullick, 1982, lihat juga: Heine Geldern, 1956). Ketika kerajaan-kerajaan itu memiliki otonominya sebagaimana halnya dengan Puri Denpasar sejak awal abad ke-19 dan berakhir pada permulaan abad ke-20 (Lihat: Geertz, 1980), tidak berarti bahwa tidak ada gangguan dari luar terhadap eksistensi kerajaan-kerajaan itu yang menyebabkan berakhirnya otonomi yang dimilikinya karena ekspansi kolonial Belanda ke Bali pada awal abad ke-20 (tahun 1906). Yang menarik adalah adanya anggapan, bahwa Belanda datang dengan kepentingan politik kolonialnya dan menaklukkan kerajaan-kerajaan itu. Hal ini tampaknya tidak sepenuhnya benar, karena tujuan utama kedatangan mereka ke wilayah-wilayah koloninya di Indonesia terutama untuk melakukan transaksi ekonomi dan perdagangan. Dalam konteks ini dibahas bagaimana terjadinya perubahan kepentingan kolonial Belanda yang awalnya di bidang ekonomi dan perdagangan kemudian mengalami perubahan untuk memprioritaskan kepentingan politiknya di tanah jajahan tidak hanya di Bali, tetapi di sebagian besar dunia kepulauan Nusantara (Ida Cokorda Ngurah Agung, 1983; lihat juga: Furnivall: 1934, dan Ardhana, 1991).

Dengan deskripsi masalah di atas muncul beberapa pertanyaan di antaranya sebagai berikut: Mengapa eksistensi Puri Denpasar dipertimbangkan memainkan peran signifikan dalam kaitannya dengan dinamika masyarakat dan budaya di Bali pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya? Bagaimana kolektif memori yang berkembang sehingga Puri Denpasar dapat memiliki otoritasnya sebagaimana dengan diplomasi dan perjuangan yang dilakukan yang terbukti memberikan kontribusinya pada bangunan negara-bangsa? Apa makna yang dapat dijadikan kontribusi bagi pemahaman warisan sejarah kerajaan Denpasar dalam aspek sosial budaya hingga sekarang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia?

## TINJAUAN LITERATUR

“Lintasan Babad Badung”. Sumber ini masih berbentuk rancangan manuskrip yang ditulis oleh almarhum Ida Cokorda Ngurah Agung (1983), yang merupakan putra sulung dari Cokorda Alit Ngurah yaitu raja terakhir kerajaan Badung yang kemudian dikenal dengan Kerajaan Denpasar. Tulisan yang dibuat oleh Ngurah Agung memberikan penjelasan tentang munculnya pemimpin Badung dari pertengahan abad ke-17 sampai abad ke-20 yaitu periode ketika keturunan memainkan peran penting dalam pengembangan gagasan nasionalis di Bali. Tulisan ini sangat berguna karena menunjukkan bagaimana para penguasa Bali melihat peran mereka di masa lalu.

I Ketut Ardhana. Juli 1994. “The Autonomy of States in the Indonesian Archipelago in the 17<sup>th</sup> and 18<sup>th</sup> Centuries”, dalam *Widya Pustaka*, Nomor: 4. Denpasar: Universitas Udayana. Tulisan ini membahas bagaimana kearifan lokal yang ada di Bali tetap dipertahankan kemudian membentuk konsep otonomi di era tradisional--sebelum kedatangan bangsa Barat sebenarnya kerajaan dan kesultanan itu memiliki otonominya yang didasari pada kebudayaan lokal mereka yang kemudian berlandaskan pengaruh baik dari Hindu, Budha, kebudayaan Jawa dan Islam--dalam konteks penguasaan wilayah yang dilakukan oleh penguasa lokal atau raja, sultan, dan gelar-gelar yang lainnya yang memiliki otonominya di wilayahnya masing-masing di Kepulauan Nusantara. Dalam tulisan ini dibahas bagaimana otonomi yang dimilikinya itu diimplementasikan dalam konteks relasi social budaya, ekonomi dan politik di negara-negara dalam hal ini baik kerajaan, maupun kesultanan di Kepulauan Nusantara yang berlanjut hingga pada abad ke-17 dan ke-18.

Namun demikian, ketika kedatangan bangsa Portugis kemudian diikuti oleh Belanda, tampak mereka tidak mengubah inovasi yang mendasar dalam konteks struktur dan pola perdagangan di Nusantara. Dapat dikatakan, mereka masih memainkan peran signifikan dalam aspek perdagangan, ekonomi dan politik dengan mengadakan perjanjian-perjanjian antara satu dengan yang lainnya tidak hanya dengan penguasa lokal tersebut, tetapi juga dengan penguasa Belanda di masa-masa berikutnya. Penguasa lokal masih memiliki kekuasaan mereka secara politik untuk mengatur daerah kekuasaan mereka. Sebaliknya di makro level, Belanda juga tidak berkeinginan mencampuri urusan dalam negeri mereka sepanjang keadaan keamanan bagi mereka yang memiliki kepentingannya di Nusantara juga terjamin. Oleh karena itu, kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-17 dan ke-18 (Leur, 1955, *passim*), dan kemudian Belanda tidaklah secara serius merongrong otonomi kerajaan atau kesultanan atau eksistensi negara-negara tersebut di Indonesia pada kurun waktu itu, sebagaimana halnya dengan kerajaan Badung atau kemudian yang dikenal dengan Puri Denpasar. Dinamika masyarakat pada awal abad ke-19 sebagaimana dapat dilihat pada karya, van Ronkel mengenai perjalanannya sampai Bali pada tahun 1899. Kemudian diikuti dengan

kisah van Geuns tentang sejarah Bali sejak pergantian abad tentang rekonstruksi dari laporan kontemporer Belanda yang termasuk kisah dalam kurun waktu itu (Ronkel, 1902). Hingga memasuki abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 menjelang terjadinya perang habis-habisan yang dikenal dengan Puputan Badung yang berarti “pertempuran habis-habisan menuju sorga atau Wisnu Loka”.

Soedjipto Abimanyu, 2014. *Kitab Sejarah Terlengkap: Kearifan Raja-Raja Nusantara: Sejarah dan Biografinya*. Yogyakarta: Laksana. Buku ini sangat menarik karena memberikan akses bagi pemahaman tentang sejauhmana peran raja-raja Nusantara dalam mempertahankan kearifan lokal yang dimiliki yang berakar dalam sejarah yang cukup panjang dalam dinamika masyarakat dan budaya di Nusantara pada umumnya dan di Bali khususnya mengenai periode sejarah Bali klasik yang memiliki fondamen bagi kelanjutan budaya dan masyarakat Bali modern. Tambahan pula, buku ini telah mampu secara komprehensif tentang biografi, profil kerajaan-kerajaan di Nusantara dan sekaligus pemaknaan kearifan lokal yang dimiliki dan dipertahankan oleh raja-raja Nusantara.

John Monfries, *Raja di Negara Republik: Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX dari Yogyakarta*. Yogyakarta: Biografi, 2018. Buku ini memberikan kontribusi signifikan bagaimana kehadiran seorang figur Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang dihormati oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu pendiri besar Negara Indonesia modern. Karena perannya yang signifikan sehingga di satu pihak ia dikatakan telah meninggalkan warisan yang positif, namun di lain pihak dikatakan ambigu dalam kaitannya dengan permasalahan politik. Namun demikian raihan yang paling menonjol karena ia berhasil mempertahankan Kerajaan Yogyakarta secara turun temurun, dimana ia mampu menciptakan stabilitas dan keberlanjutan “langka” dalam sejarah Indonesia modern. Ketika masa Orde Baru yang berkuasa lebih dari 32 tahun secara authoritarian dan sentralistik, ia tampak memberikan kontribusi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, meskipun menurut Monfries ia disimbulkan sebagai “kepatutan politik” ia menghilang dari kekuasaan dan pengaruh sebagai wakil presiden pada tahun 1970-an. Ini tidak terlepas dari adanya sifat represif dan anti demokrasi yang diterapkan rejim Orde Baru yang sangat berbeda dengan apa yang pada awalnya diperjuangkan oleh Hamengku Buwono.

Gerry van Klinken. 2010. “Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal”, dalam James Davidson, David Henley, Sandra Moniaga. *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia. Karya Gerry van Klinken sangat menarik untuk dibahas berkaitan dengan bagaimana kemunculan sultan yang hendaknya dibahas dalam ranah empiris rejim-rejim otonomi pasca-1999 (Lihat juga: Korn, 1924). Menurut Klinken otonomi yang dimiliki oleh sultan ini disebabkan karena tidak terpetakan dengan baik meski berubah secara cepat. Oleh karena itu, kajian tentang bangkitnya para sultan atau “raja” di wilayah lainnya seperti di Bali dan wilayah-wilayah lainnya di Kepulauan Indonesia dalam konteks pemahaman dasar yang sangat signifikan dalam upaya memahami bagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat di Bali pada khususnya bekerja dan berupaya untuk memahami apa yang membentuk sebuah kehidupan yang lebih baik (Klinken, 2010: 166).

## **METODE DAN TEORI**

Metode pengkajian yang digunakan sejarah, arkeologi, tradisi lisan, sastra, dan ilmu politik. Metode Pustaka, mengkaji aneka sumber tradisional yang terdapat pada

prasasti, lontar, babad, arsip yang terdapat pada masa kerajaan-kerajaan tradisional buku, ensiklopedia, dan jurnal baik nasional, maupun internasional. Metode lapangan, dilaksanakan dengan menggali informasi, melalui observasi sistematis, wawancara mendalam dan analisis isi. Penelitian ini merupakan penelitian multidisiplin antara nilai-nilai kesejarahan, keagamaan, tradisi lisan, kebudayaan, hukum, dan politik, khususnya dalam membahas otonomi, diplomasi dan perjuangan dalam kontribusinya pada bangunan-negara bangsa di Indonesia (Lihat misalnya: Hobsbawn dan Terence Ranger, 1983, *passim*).

Terdapat banyak studi tentang bagaimana kejatuhan kerajaan-kerajaan tradisional di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya, namun tidak banyak yang membahas bagaimana otonomi yang dimiliki itu kemudian beralih ke kekuasaan kolonial Belanda dan mengalami beberapa perkembangan berupa kelanjutan dan terjadinya beberapa perubahan pada masa selanjutnya. Hal ini tentu berkaitan dengan bagaimana proses tersebut berlangsung dalam kaitannya dengan perkembangan teori-teori sosial yang berkaitan dengan globalisasi misalnya. Ini penting dipahami dalam konteks perkembangan dengan teori-teori imperialisme modern yang tampaknya dilakukan masih sangat terbatas. Ini dapat dipahami karena bagaimanapun perebutan otonomi yang dilakukan kekuasaan kolonial Belanda sehingga terjadinya Puputan Badung di Puri Denpasar pada bulan September tahun 1906 yang kemudian diikuti oleh puputan lainnya di Kerajaan Tabanan pada bulan Desember tahun 1906 dan kemudian seperti yang terjadi pada Puputan Klungkung tahun 1908 itu tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi di dunia Eropa dalam kaitannya dengan perkembangan imperialisme modern dalam kurun waktu 1880 hingga 1914. Oleh karena itu, dilihat seberapa jauh perampasan otonomi yang dilakukan oleh penguasa kolonial Belanda di tingkat lokal di Bali, dibahas dalam pembahasan ini.

Wolfgang J. Mommsen (1979), dalam bukunya *Imperialismus Theorien* Mommsen, Gottingen: Kleine Vandenhoeck-Reihe. Buku ini membahas perkembangan teori imperialisme modern yang berkaitan dengan perampasan kekuasaan penguasa tradisional terhadap otonomi yang dimilikinya itu dengan menekankan pembahasan praktek-praktek imperialisme tersebut di negara-negara jajahannya yang merambah bagian dunai lainnya di Afrika dan Asia pada akhir abad ke-19 dan memasuki awal abad ke-20. Di antara teori-teori yang dikemukakan oleh Mommsen dalam kajian ini dilihat seberapa jauh penerapan teori-teori dalam kaitannya dengan masalah otonomi yang dimiliki oleh Puri Denpasar sebelum kejatuhannya ke tangan Belanda, meskipun diketahui, bahwa belum ada bukti-bukti kesejarahan yang menunjukkan bahwa Puri Denpasar menyerah terhadap persoalan otonomi yang dipegangnya kepada penguasa Belanda. Konflik kepentingan yang terjadi di antara negara-negara Eropa atau Barat telah menciptakan suatu perubahan kebijakan pemerintah Inggris yaitu dari kebijakan informal menuju kebijakan formal. Gallagher dan Robinson menyatakan "*herrschaft auf informelle Weise solange wie möglich, durch formelle Annektion, wenn notig*". Demikianlah imperialisme Inggris di Eropa diformulasikan dengan *British policy followed the principle of extending control informally if possible and formally if necessary*. Artinya pelaksanaan kekuasaan imperialisme yang bersifat informal dipraktekkan di negeri jajahan mereka sepanjang memungkinkan, kemudian diganti dengan kekuasaan yang bersifat formal jika diperlukan (Gallagher dan Robinson, 1979: 185; bandingkan dengan Mommsen, 1979, lihat juga: Locher-Scholten, 1994).

Melalui pendekatan teori-teori imperialisme modern inilah dibahas bagaimana Puri Denpasar untuk mempertahankan otonominya dilakukan puputan atau perang habis-

habisan tanpa mengenal menyerah, karena tidak ingin menyerahkan otonominya kepada penguasa Belanda. Ini yang menjadi argumentasi di masa kekinian, berkaitan dengan kontribusi Puri Denpasar dengan berbagai upaya untuk tetap mempertahankan otonominya dalam konteks adanya keberlanjutan dan adanya perubahan. Hal serupa tampaknya terjadi juga di beberapa daerah lainnya di Kepulauan Nusantara pada akhir abad ke-19 dan memasuki awal abad ke-20. Dalam hal ini meskipun otonomi dalam konteks politik sudah dipaksa untuk dirampas oleh Belanda, namun perlawanan tanpa henti terus dilakukan sebagaimana dapat dilihat perlawanan yang berlanjut pada masa revolusi, hingga akhirnya Puri Denpasar menyerahkan kesetiannya untuk mengatur otonomi yang pernah dimiliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kerajaan Denpasar: Awal Perkembangan dan Otonomi**

Keberadaan Kerajaan Badung berawal dari berdirinya Puri Ngalang Badung atau Alang Badung. Kata *ngalang* berarti menyeberangi, dan Badung merujuk pada nama pohon, yakni pohon *badung*. Tempat ini merupakan pusat pemerintahan baru dari wilayah lama, yakni di Puri Tegeh Kori. Akibat konflik internal antara keluarga raja Tegeh Kori, maka puri yang rusak karena perang tersebut, dipindahkan ke tempat baru, sebagai awal pemerintahan dari dinasti baru di Kerajaan Badung. Perpindahan di tempat yang baru itu, juga dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan Kyai Gede Raka atau Kyai Bendana (keponakan dari Raja Tegeh Kori) terhadap anugerah sabda Ida Betari Danu di Gunung Batur yang memberi petunjuk agar ia menuju ke arah selatan di daerah yang gelap, tidak kelihatan dalam bahasa Bali: *badeng*. Kata *badeng*, berkembang menjadi *badung*. Puri Alang Badung sebagai cikal bakal Kerajaan Badung ini terletak di daerah Suci sekarang, tepatnya di sebelah timur sungai atau Tukad Badung menghadap ke barat. Sampai sekarang di tempat ini terdapat peninggalan masa lampau, berupa *pura* yang diduga sebagai *pemerajan* dari Puri Alang Badung. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa secara toponimi kata Puri Denpasar berasal dari kata *puri* dan Denpasar. Kata *puri* berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu *pur* yang berarti benteng pertahanan. Kata Denpasar berasal dari kata *den* yang berarti utara yang menunjuk ke arah gunung dan kata *pasar* atau *paser* sebagaimana sering disebut dalam inskripsi yang berarti tempat terjadinya transaksi perdagangan pada masyarakat pada saat itu. Puri Denpasar sesuai dengan arti kata puri itu berasal dari Bahasa Sanskerta *pur* adalah benteng merupakan benteng baik dalam pengertian fisik bangunan yang mengandung makna atau simbol kekuasaan otonomi, maupun mengandung makna non fisik dalam kaitannya dengan sistem nilai adiluhung seperti filosofi, norma hukum (adat) (Abdurrahman: 1984, dibandingkan dengan Kulke, 1986), dan berkaitan dengan kebijakan mengatur pemerintahan yang berlandaskan ajaran *Asta Brata* sebagai konsep kepemimpinan Hindu yang hingga kini masih dianut oleh masyarakat dan budaya Bali. Dari deskripsi ini dapat dipahami bahwa nilai spiritual menjadi dasar dalam menentukan tempat sebuah pemerintahan. Anggapan bahwa peperangan yang terjadi di istana kerajaan akan menghilangkan kewibawaan dan kesucian istana yang dapat membahayakan kekuasaan raja dan kerajaan. Dari kepercayaan ini dapat dilihat, bahwa istana atau kerajaan dimana sang raja bertempat tinggal dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan birokrasi kerajaan, telah kehilangan kesaktian dan kesuciannya. Keadaan ini dipertimbangkan berpengaruh terhadap masa depan kekuasaan raja dan kerajaan (Ida Tjokorda Ngurah Agung, 1983: 42). Nilai-nilai tradisional tentang kekuasaan raja yang terkait dengan

kondisi kerajaan ini berpengaruh pada pemahaman konsep tentang kekuasaan raja sebagaimana terjadi juga di Jawa.

Perpindahan pusat pemerintahan di Ngalang Badung, sebagai suatu tempat yang ditunjuk oleh Ida Betari Danu mengandung makna akan adanya legitimasi bagi *puri* dan raja atau dinasti baru yang memerintah di wilayah Badung. Sistem pemerintahan di awal pemerintahan di Alang Badung adalah merupakan bentuk persatuan dari garis keturunan Kyai Bendana, dikenal dengan Kyai Jambe Pule. Kyai Jambe Pule ini memiliki tiga orang isteri, yang masing masing, dari isteri pertama melahirkan Kyai Ngurah Jambe Merik, pendiri Puri Alang Badung. Dari isteri berikutnya melahirkan Kyai Ngurah Pemedilan atau Kyai Ngurah Pemecutan yang membangun Puri Pemecutan, dan dari isteri yang ketiga melahirkan Kyai Ngurah Tumbak Bayuh atau Kyai Gelogor yang membangun Puri Gelogor. Sebagai putera tertua Kyai Jambe Merik memegang tampuk pemerintahan, dibantu oleh saudaranya dari Puri Pemecutan dan Puri Gelogor. Oleh karenanya nama Jambe selalu melekat pada silsilah raja raja Denpasar, karena meyakini bahwa Puri Agung Denpasar lahir dari Dinasti Jambe. Pada awal pemerintahannya, Puri Alang Badung yang diperkirakan berdiri sekitar pertengahan abad ke-17, memiliki basis rakyat yang berasal dari rakyat di Puri Tegeh Kori yang telah menyatakan dukungannya kepada penguasa baru di Badung, bersama dengan 250 orang hadiah dari Dalem Dimadhe di Gelgel atas jasa Kyai Jambe Merik yang berhasil mengusir sekawanan burung gagak, serta keahlian Kyai Ngurah Pemedilan memainkan cambuk di puri Gelgel (sebagai referensi lihat lebih lanjut: Ida Tjokorda Ngurah Agung, 1983, *passim*).

Dalam perkembangan selanjutnya kekuasaan Kerajaan Badung di bawah kepemimpinan dinasti Jambe Pule yang diwakili Puri Alang Badung dan Pemecutan ini semakin besar. Perluasan kekuasaan dilakukan antara lain melalui politik perkawinan dengan keluarga *puri* yang berada di sekitar wilayah Badung. Pada tahun 1775 keturunan seorang keturunan Dinasti Alang Badung, I Gusti Jambe Aeng memindahkan pusat pemerintahan ke Puri Satriya, maka dinamika kekuasaan internal antara keluarga puri, melahirkan pusat kekuasaan baru yang tetap merepresentasikan Kerajaan Badung, yakni Puri Kesiman. Dinamika politik kekuasaan Kerajaan Badung pada abad ke-18 dan ke-19, baik secara internal, maupun eksternal memperlihatkan otorisasi yang kuat dalam memperbesar dan memperkuat kekuasaannya. Sistem pemerintahan di wilayah ini tergolong unik, karena dalam perjalanan sejarahnya sering mengalami perpindahan pusat pemerintahan (*puri*), sesuai dengan tempat kedudukan raja yang memerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan di Kerajaan Badung, dikendalikan oleh penguasa yang memiliki hubungan keluarga dari garis keturunan yang sama. Mereka adalah Puri Satria (Denpasar), Puri Pemecutan dan Puri Kesiman. Secara internal mereka merupakan kekuasaan kembar, tetapi eksternal mereka mempresentasikan sebagai kekuasaan tunggal Kerajaan Badung. Ketiga *puri* yang berasal dari garis keturunan yang sama (Kiyayi Jambe Pule) saling bekerjasama membangun kebesaran dan keutuhan Kerajaan Badung, yang kemudian dikenal dengan Kerajaan atau Puri Denpasar. Secara eksternal hubungan Kerajaan Badung dengan kekuatan asing Belanda menunjukkan hubungan kerjasama politik yang saling menguntungkan. Pada tahun 1808 diadakan perjanjian politik antara Badung dengan pihak kolonial Belanda yaitu van der Wahl. Inti dari perjanjian itu adalah bahwa Belanda mengakui dan melindungi Kerajaan Badung, dan sebaliknya raja Badung mengizinkan Belanda membangun kamp dan rumah bagi orang Belanda di wilayah Badung. Perjanjian selanjutnya terjadi pada tahun 1826 dengan J. S. Wetters, sebagai

wakil pemerintah Belanda. Bagi kedua belah pihak, baik dari kerajaan Badung dan pemerintah kolonial Belanda, hal ini mengisyaratkan adanya keinginan politik untuk membendung pengaruh kekuatan asing lain yaitu kehadiran kolonial Inggris di Bali, yang pada tahun 1814 telah menyerang dan mengalahkan Kerajaan Buleleng di Bali Utara (Ardhana, 1998: 18).

### **Otonomi, Diplomasi, Perjuangan dan Kontribusinya dalam Konteks Terbentuknya Negara-Bangsa**

Otonomi memiliki makna signifikan ketika membahas tentang keberadaan kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia di masa lalu (Monfries, 2018: passim). Sebagaimana diketahui bahwa meskipun kedatangan bangsa Barat seperti Portugis dan Spanyol pada abad ke-17 dan ke-18 sebelum kedatangan bangsa Belanda dan Inggris, namun kedatangan mereka tampak mengubah atau melembagakan suatu inovasi yang mendasar dalam konteks struktur dan pola perdagangan di Kepulauan Indonesia. Dengan kata lain, kerajaan-kerajaan atau negara tradisional yang ada di wilayah itu tetap memainkan peranan penting dalam aspek ekonomi dan politik (Ardhana, 1994: 45). Tambahan pula, mereka memiliki kekuasaan untuk memerintah di daerah kekuasaan mereka di skala lokal sebagaimana yang terjadi di Mataram (Yogyakarta) (van Klinken, 2010: passim), Makassar, Aceh, dan demikian juga pada kerajaan-kerajaan di Bali (Lihat lebih lanjut: Abang Ishar. 2016).

Ini dapat dipahami bahwa dalam catatan sejarah bahwa terdapat konsep raja atau sultan dan kerajaan atau kesultanan yang merupakan sebuah warisan tradisional yang memberikan kontribusi signifikan dalam terbentuknya sebuah kebudayaan modern di Bali. Raja dipandang sebagai sebuah konsep yang memiliki kaitan supernatural yang dipandang sebagai titisan dewa atau dengan konsep dewa-raja "*devaraja cult*" yaitu wujud pemujaan dewa-raja di dunia (tentang hal ini baca: Barth, 1993, bandingkan dengan Lansing, 1983a dan 1983b). Dalam melaksanakan pemerintahannya sebagai wakil Tuhan di dunia yaitu melalui lembaga tradisional atau dengan konsep kerajaan untuk mengelola tatanan pemerintahan tradisional di Bali pada masa lalu. Dengan dasar pemikiran ini tampaknya apa yang dikemukakan oleh James Scott yang menganggap bahwa relasi kuasa yang terjadi bersifat proteksi daripada eksploitasi sebagaimana dikatakan oleh Popkin. Namun demikian, pendapat yang dikatakan oleh Samuel Popkin juga tidak sepenuhnya salah, dengan argumentasi relasi kuasa politik yang berkaitan dengan pemungutan pajak terhadap para kawula tampaknya juga memiliki kebenaran (tentang perdebatan kedua teori ini baca lebih lanjut: Scott, 1976 dan Popkin, 1979).

Di satu pihak memang terdapat anggapan bahwa relasi kuasa antara raja dengan rakyatnya dipandang sebagai sebuah bentuk eksploitasi (*exploitative*) dimana adanya berbagai bentuk relasi kuasa dalam kaitannya dengan adanya pungutan pajak, perintah kerja bakti atau bakti desa, atau pun bentuk perintah lainnya yang berkaitan dengan masalah adat dan agama yang tidak dapat dipisahkan antara kepentingan adat dan agama itu sendiri (Baca: Bouchier, 2010). Relasi kuasa seperti ini terjadi dalam tradisi kekuasaan masa lalu di Asia Tenggara pada umumnya dan di Jawa atau daerah lainnya dan demikian juga halnya dengan di Bali pada khususnya. Demikian dikatakan oleh Popkin (Popkin, 1979: 327). Sementara itu, di pihak lainnya ada pandangan sebagaimana dikemukakan oleh James C. Scott (1976, 254), bahwa tradisi kekuasaan yang terjadi di Asia Tenggara itu sebenarnya bukanlah merupakan relasi kuasa yang bersifat eksploitatif, tetapi relasi kuasa (*power relationship*) yang merupakan bentuk proteksi atau perlindungan yang dilakukan oleh raja terhadap kawula atau rakyat yang

berada di struktur di bawahnya, yang dikenal dengan hubungan patron-client (*patron-client relationship*). Tulisan ini tidak dalam konteks membenarkan atau tidak membenarkan dengan pendapat tersebut, namun lebih dipusatkan dengan memberikan argumentasi mengapa kedua tulisan itu saling mendukung dalam menganalisis masalah otonomi kerajaan Denpasar. Tampak bahwa terdapat hubungan relasi kuasa memang terjadi, dan kebenaran akan pendapat kedua ahli tersebut baik Popkin dan James Scott hendaknya dikembalikan pada jiwa zaman (*tijdgeest*) ketika hal tersebut berlangsung dalam dinamika sejarah Asia Tenggara pada umumnya dan sejarah Indonesia pada khususnya, (Lebih lanjut baca: Scott, 1976, *passim*.)

Sementara itu, ketika Belanda mulai menyentuh wilayah itu kemudian, juga tampak tidak memiliki keinginan untuk ikut campur dalam persoalan-persoalan internal kerajaan di wilayah Asia Tenggara pada umumnya. Puri Denpasar sebagai salah satu kerajaan yang memainkan peran signifikan dalam konteks sejarah Indonesia pada khususnya dan di Asia Tenggara pada umumnya juga pada awal kemunculannya yang dikenal sebagai kerajaan Badung disebut-sebut memiliki peran yang signifikan di samping kerajaan-kerajaan lainnya seperti Aceh, kesultanan Yogyakarta dan kerajaan lainnya di Kepulauan Nusantara. Bahkan, tidak mengherankan jika dilihat eksistensi Kesultanan Aceh, yang berhasil menunjukkan komitmennya dalam penerapan ajaran Islam dan hukum adat di Aceh, demikian pulan halnya dengan Kesultanan Yogyakarta yang berhasil tetap mempertahankan otonominya dalam konteks kebudayaan Jawa dan sistem pemerintahan di masa lalu yang menjadi ciri keunikan kedua wilayah itu. Ini tidak berarti, bahwa kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara diabaikan, karena dengan adanya sistem pemerintahan di masa lalu tampak mewarnai karakter terciptanya bangunan negara-bangsa (*nation-state building*) dalam kaitannya dengan terbentuknya negara Indonesia modern. Van Leur tampaknya melihat kategori yang dilaksanakan secara universal untuk mengembangkan sejarah sosial ekonomi sebelum berbicara tentang otonomi itu sendiri atau *eigenwettelijkheid* di suatu daerah dalam periode tertentu. Dalam pandangan yang sama, John R. W. Smail juga menegaskan arti otonomi yang merujuk kepada orang yang memiliki tradisi kesejarahan mereka (Smail, 1961: 72). Oleh karena itu, dipandang penting untuk mengenal dan memahami tradisi kesejarahan masa lalu itu yang masih berlangsung, ketika bangsa Eropa mendarat di kawasan itu.

Dari gambaran di atas tampak bagaimana peran kerajaan atau kesultanan lainnya di Nusantara tersebut memainkan peranan yang signifikan di wilayah kawasan regional yang tampak masih berhasil menguasai dunia lautan dengan mengadakan perdagangan antara kesultanan yang satu dengan yang lainnya. Namun demikian, meskipun konsep dunia Puri Denpasar di wilayah daratan mengarah ke gunung, namun ini tidak berarti tidak memiliki peranan yang signifikan dalam kaitannya dengan perspektif tentang dunia laut. Ini dapat dilihat bagaimana otonomi di wilayah laut yang berkaitan dengan *hukum tawan karang (kliprecht)* yang berlaku di pantai-pantai di Bali Selatan pada umumnya diimplementasikan ketika berhadapan dengan lawan-lawan politiknya (Baca: Arsip Nasional Republik Indonesia. 1964). Sebelum munculnya negara modern (*modern state*), Puri Denpasar sebelum kedatangan kekuasaan Belanda juga memiliki otonomi berdasarkan otonomi wilayah. Pada masa lalu Puri yang disebut dengan juga dengan istilah “negara”, karena memiliki kekuasaan dalam konteks penguasaan politik, akan tetapi setelah masuknya Belanda menjadi kehilangan hak-hak politik tersebut. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa Puri kehilangan semua otonomi yang dimilikinya. Dalam kaitan ini dapat dilihat dengan bagaimana otoritas yang masih

dimilikinya terutama dalam kaitannya dengan otoritas spiritual (*spiritual authority*), yang dimilikinya hingga saat ini. Ketika munculnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tampaknya konsep otonomi wilayah ini masih menjadi akar-akar budaya yang berlangsung sejak waktu yang cukup lama dalam dinamika sejarahnya (Darmiati, et al. 1998). Ini dapat dipahami, karena sebagaimana diketahui, bahwa Puri Denpasar memiliki beberapa situs atau pura yang memainkan peran penting di masa lalu seperti adanya 13 buah pura yang menjadi indikator budaya (*cultural identities*) terhadap keberadaan Puri Denpasar di masa lalu dan masa kini. Hingga kini, di antara pura-pura itu terdapat hanya dua pura yaitu Pura Uluwatu dan Pura Sakenan yang masih menjadi bagian asset yang dimiliki oleh Puri Denpasar. Hingga kini, pemerintah daerah atau pmda Bali masih memberikan bantuan kepada Puri Denpasar berkaitan dengan keberadaan situs pura tersebut. Ini membuktikan akan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah Bali terhadap Puri Denpasar untuk tetap menjaga dan memelihara situs-situs pura seperti Pura Uluwatu dan Pura Sakenan sebagai warisan budaya bagi masyarakat di Bali.

Mempersoalkan bagaimana otonomi yang dimiliki itu bergeser ke beberapa aspek perkembangan masyarakat tampaknya sudah menjadi bagian dari sejarah. Namun demikian tugas sejarah juga untuk mengembalikan asset tersebut, sehingga dapat memperkokoh eksistensi Puri Denpasar dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Adanya asset-asset tersebut dan adanya perlawanan Puri Denpasar untuk mempertahankan modal sosial dan budaya yang dimiliki itu. Dengan kata lain, Puri Denpasar ternyata mampu menyayomi dan menjaga kelestarian adat budaya, yang dilandasi agama Hindu (Coedes, 1968), sehingga memperkokoh ketahanan adat dan budaya Bali

### **Pembertahanan Otonomi, Konflik dan “Puputan”**

Puputan Badung merupakan sebuah konsep perlawanan rakyat Bali di Puri Denpasar pada khususnya, dan di Bali pada umumnya. Sebelumnya telah dipahami bahwa Kerajaan Badung merupakan salah satu kerajaan penting di Bali yang kemudian dalam istilah lokal dengan nama Puri Denpasar. Puri Denpasar ini mengandung makna sebuah tempat istana atau puri yang terletak di sebelah utara pasar (sekarang pasar yang dimaksud adalah Lapangan Puputan Badung yang diberi nama “Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung”) yang secara ksatria atau heroik sebagai seorang pahlawan dari Bali yang mengadakan perlawanan puputan atau perlawanan “sampai habis-habisan” yang tidak mengenal untuk menyerah kepada musuh atau *puput* (Bahasa Bali: *puput* artinya selesai) melawan aneksasi, intervensi dan agitasi kekuasaan pemerintah kolonial Belanda terhadap Puri Denpasar. Sebelumnya perlu dipahami, bahwa Puri Denpasar sering disebut oleh sumber-sumber Belanda sebagai Kerajaan Badung (*Badoeng rijkdom*). Ini adalah nama yang dikenal pada awal munculnya sebagai kerajaan Badung di Bali Selatan. Henk Schulte Nordholt dalam karyanya yang berjudul “Macht, Mensen en Middelen: Patronen van Dynamiek in de Balische Politiek 1700-1840 (1980: 64) berpendapat, bahwa pada tahun 1700, Badung merupakan bagian dari Klungkung, namun berada dibawah pimpinan Raja Mengwi. Bagian di sebelah Barat Badung dikuasai secara langsung oleh Raja Mengwi dan bagian timurnya merupakan kerajaan kecil yaitu Kerajaan Pinatih yang dikuasai secara tidak langsung. Henk Schulte Nordholt menambahkan bahwa Raja Mengwi mengangkat Gusti Jambe sebagai bawahannya di Satria (Schulte Nordholt, 1980: 64).

Menjelang akhir abad ke-18, terjadi konflik atas kendali Badung antara Gusti Jambe dan adik laki-lakinya yang bernama Gusti Ngurah Made Kaleran. Gusti Jambe dibunuh oleh *punggawa*-nya sendiri yang bernama Gusti Ngurah Rai—yang menurut Cokorda Ngurah Agung, Gusti Ngurah Rai adalah orang yang sama dengan Anak Agung Ngurah Rai (Cokorda Ngurah Agung, 1983: 75, Lihat juga: Ardhana, 1993: 17)- dan Gusti Ngurah Made Kaleran yang kemudian diangkat sebagai penguasa Badung (Baca: PH S. Ronkel, “Dagverhaal van eene Reis van den Resident van Bali en Lombok Vergezeld van den Controleur voor de Politieke Aanrakingen en de Poenggawa’s Ida Bagoes Gelgel en Goesti Ktoet Djlantik naar Tabanan en Badoeng”, (1902: 138). Gusti Ngurah Made Kaleran pindah ke Kasiman sehingga gelarnya menjadi Gusti Gde Kasiman. Sidemen yang mengutip dari laporan J. Sieberg dalam *Memorie van Overgave* (ARA) VOC 3389 mencatat, bahwa pada tahun 1779, Gusti Gde Kasiman (Gusti Ngurah Made Kaleran) merebut kekuasaan Gusti Jambe di Pamacutan untuk memperkuat posisinya melawan Mengwi. Tampaknya para penguasa Badung tidak lagi merasa puas berada dibawah pimpinan Mengwi. Hal ini mengarahkan pada keberhasilan pemberontakan melawan Mengwi yang diatur oleh Gusti Ngurah Made Kaleran yang kemudian memindahkan purinya ke daerah antara Satria dan Pamacutan. Puri ini disebut Puri Denpasar (Sidemen, 1992: 24) dari tempat Gusti Ngurah Made Kaleran memimpin Badung sebagai I Gusti Ngurah Sakti Pamacutan (Sidemen, 1992: 67—68, Ardhana 1993: 16).

Kerajaan yang ada sebelum berdirinya kerajaan Badung yaitu Kerajaan Mengwi menyerah kepada Kerajaan Badung pada tahun 1823. Dengan demikian Kerajaan Mengwi tidak tampak lagi dalam peta percaturan politik pada masa-masa berikutnya. Menurut tradisi lisan seperti dituturkan oleh Cokorda Ngurah Agung dari Puri Denpasar yang dalam karyanya berjudul, *Lintasan Babad Badung (handscript)* yang ditulis sebelum wafatnya yaitu pada tahun 1983 mencatat, bahwa kata *badung* pada kata Kerajaan Badung berasal dari kata *badeng* yaitu suasana atau keadaan mendung dan gelap ketika perjalanan dari utara menuju ke selatan menuju ke tempat yang akhirnya menjadi tempat berdirinya Kerajaan Badung yang kemudian dikenal dengan Puri Denpasar. Kehadiran konsep raja dan kerajaan atau Puri Denpasar dipandang memiliki makna signifikan, karena dengan hadirnya kerajaan Denpasar yang memiliki otonomi ini dikaitkan dengan berbagai nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat lokal di Bali dalam menjaga, mempertahankan makna otonomi yang dimaksudkan itu. Mengapa dan bagaimana sikap mempertahankan otonomi ini dilakukan dengan pelaksanaan puputan berikut dibahas argumentasi yang dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan otonominya terhadap kekuasaan Belanda (Cokorde Ngurah Agung, 1983, passim).

### **Otonomi Puri Denpasar Pada Akhir Abad Ke-19 dan Awal Abad Ke-20**

Memasuki abad ke-19, puri-puri di Bali dan kerajaan-kerajaan di Nusantara menghadapi tekanan-tekanan politik yang semakin intensif dari pemerintah kolonial Belanda yang sudah mengunjungi Bali sejak tahun 1597. Hingga memasuki abad ke-17 dan ke-18 puri-puri yang ada di Bali masih memiliki dan memegang otonominya secara kuat --sebagaimana halnya dijelaskan oleh Van Leur berkaitan dengan otonomi kerajaan-kerajaan pribumi di Nusantara pada saat itu-- meskipun pengaruh-pengaruh Belanda sudah semakin dirasakan walau dalam pengertian sangat terbatas. Sementara itu, intervensi kekuasaan kolonialisme dan imperialisme Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Jerman sudah semakin intensif membagi wilayah-wilayah koloninya

di benua Afrika dan wilayah lainnya. Ini menandakan suatu gerakan kolonialisme dan imperialisme yang semakin kuat dan kompetitif di daerah-daerah jajahannya.

Demikian pula halnya dengan Belanda di Indonesia yang mulai menyadari akan ancaman yang dihadapi apabila kekuasaan koloninya di Hindia Belanda tidak dikelola secara baik dalam konteks *Pax Nederlandica*, tentu persaingan-persaingan yang dilakukan oleh penguasa kolonial lainnya dianggap akan dapat mengganggu eksistensi pengaruhnya di Hindia Belanda. Sementara itu, di Bali terutama di Puri Denpasar, tampak Belanda tidak mampu secara penuh mengimplementasikan kekuasaan politiknya karena pengaruh yang kuat dari raja-raja yang masih mempraktekkan kekuasaan otonominya di Bali Selatan. Suasana politik ini tidak dapat diterima oleh Belanda terutama dalam kaitannya dengan konsep *Pax Nederlandica* yang akan diimplementasikan secara penuh di tanah jajahannya di Hindia Belanda. Dengan demikian, Belanda merencanakan akan menempatkan struktur raja-raja lokal di bawah struktur birokrasi kolonial Belanda.

Oleh karena beberapa hal signifikan yang diperhatikan oleh penguasa Belanda di Indonesia adalah sebagaimana dikemukakan oleh Gallagher bahwa kekuasaan Eropa di negeri jajahannya dilaksanakan dengan pertama melaksanakan hubungan tidak langsung dan informal apabila memungkinkan, dan kemudian melakukan hubungan yang langsung dan formal apabila diperlukan. (*“informal and indirect rule if possible, and formal and direct rule if necessary”*). Namun demikian, penguasa kolonial Belanda beranggapan bahwa keinginan untuk mengadakan aneksasi bukanlah berasal dari negeri induk atau penjajah, tetapi karena adanya reaksi terhadap permintaan terhadap negeri penjajah untuk memberikan bantuan kepada negeri koloninya. Di sini diinterpretasikan, bahwa bukanlah negeri Belanda yang aktif mengadakan aneksasi melainkan dari negeri koloni sendiri. Berbagai pendapat tentang teori-teori ini bermunculan ketika mencari jawaban mengapa pada akhirnya Belanda melakukan agresi militer atau dikenal sebagai *militaire expedition* ke wilayah koloninya untuk meyakinkan bahwa penguasa-penguasa lokal tunduk dan patuh kepada negeri induknya di Belanda dalam kaitannya dengan *Pax Neerlandica* (Gallagher dan Ronald Robinson, 1979: 185, lihat juga: Mommsen, 1979). Pada tahun 1890, Raja Puri Denpasar yaitu Cokorda Gde Ngurah Pamacutan wafat. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Gusti Gde Ngurah Denpasar (Cokorda Alit Ngurah Pamacutan). 101 Sumber dari Belanda melaporkan bahwa Belanda mengakui status Gusti Gde Ngurah Denpasar di Puri Denpasar dan status Gusti Ngurah Pamacutan di Puri Pamacutan sebagai penguasa bersama (*Cokorda Kalih*) Badung pada tanggal 12 Februari 1891. Pada tahun yang sama (1891), perang pecah antara Badung dan Mengwi. 103 Raja Klungkung yaitu Dewa Agung yang mendukung para Raja di Denpasar, Pamacutan dan Tabanan, yang bersama-sama mengalahkan Raja Mengwi. Pada tahun 1898, Raja Mengwi tidak berhasil menyerang Puri Badung.

Raja Denpasar, Gusti Gde Ngurah Denpasar (Cokorda Alit Ngurah Pamacutan) yang meninggal pada tahun 1902. Karena putranya masih muda, Gusti Gde Ngurah Denpasar digantikan oleh saudaranya yang bernama Cokorda Ngurah Made Agung yang juga dikenal sebagai Gusti Gde Ngurah Denpasar. Pada waktu itu, kekuasaan Cokorda Ngurah Made Agung tetap kuat seperti hubungannya dengan Raja Tabanan. Hal ini dapat dilihat dari kehadirannya saat upacara kremasi kematian Raja dan upacara *mesatia* untuk dua kerabatnya pada tanggal 25 Oktober 1903. *Mesatia* merupakan upacara yang dilakukan setelah kematian seorang Raja. Istri dan pelayannya melemparkan diri mereka ke dalam api untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja yang telah meninggal. Mereka melakukan *satia* tanpa dipaksa oleh keluarga

kerajaan namun melalui satia ini mereka ingin menunjukkan kesetiaan mereka dengan membakar diri mereka bersama dengan mayat Raja yang telah meninggal. Kehadiran Cokorda Ngurah Made Agung di Tabanan adalah mendorong Raja Tabanan untuk melakukan upacara *satia*. Cokorda Ngurah Made Agung percaya bahwa upacara ini tidak melanggar perjanjian antara Belanda dan para Raja di Bali selatan yang telah ditandatangani pada tahun 1849. Sebaliknya, Belanda menganggap satia sebagai hal yang biadab dan tidak manusiawi. Namun, pada saat itu, Belanda tidak berhasil melarang upacara *satia*. Pada akhirnya, setelah upacara berlangsung, Belanda memerintahkan Raja untuk menghapuskan upacara tersebut. Perjanjian ini ditandatangani oleh Raja Tabanan dan penduduk Bali serta Lombok, J. Eschbach pada tanggal 20 Januari 1904 (Lihat juga: Agung, 1991).

Hingga awal abad ke-20 (sebelum *puputan*), Belanda tidak mampu sepenuhnya melaksanakan kebijakan politik di Bali karena pengaruh yang kuat dari Para Raja dalam menggunakan kekuasaan mereka terutama di wilayah Bali Selatan. Belanda menganggap situasi ini tidak dapat diterima dalam hal tujuan *Pax-Neerlandica*. Oleh karena itu, Belanda berencana untuk mengubah sistem politik ini, dengan menghapus semua kerajaan Bali dan menempatkan para raja di bawah kekuasaan kebijakan Belanda. Periode ini menjadi perubahan besar di Denpasar. Pada tanggal 1 Oktober 1904, Ratu Wilhelmina menunjuk Johannes Benedictus van Heutz sebagai Jenderal Gubernur di Hindia Belanda, sebuah perjanjian yang ditujukan untuk memfasilitasi pendirian *Pax-Neerlandica*. Pada tanggal 27 Mei 1904, Belanda melihat kesempatan untuk memperluas kekuasaan ke Bali. Sebuah kapal kecil "Sri Komala" milik Kwee Tak Tjiang dari Banjarmasin, kandas di Pantai Sanur kemudian dijarah oleh masyarakat setempat. Setelah kejadian itu, pemilik kapal pergi ke pemukiman Bali dan Lombok di Singaraja, J. Eschbach menuduh masyarakat Sanur telah merebut kapalnya. Eschbach memerintahkan Raja Denpasar Cokorda Ngurah Made Agung untuk membayar 3000 ringgit (7500 gulden/mata uang Belanda) sebagai kompensasi. Raja Denpasar kemudian menolak untuk membayar apapun. Sebagai akibatnya, Belanda di bawah pimpinan Schwartz melakukan blockade ekonomi di wilayah Badung. Namun itu tidak sepenuhnya berhasil, karena Raja Tabanan mendorong Badung untuk menentang Belanda dan menyalurkan barang ke Badung dari pelabuhan lain. Dukungan raja memiliki alasan yang berkaitan dengan sejarah dan politik. Keluarga kerajaan adalah saling memiliki ikatan dan catatan dari Korn bahwa para Raja memiliki kesepakatan pertahanan dan saling mendukung di *mesatia*. Sementara Belanda menyiapkan pasukan untuk dikirim ke Bali untuk menyerang Kerajaan Badung dan Tabanan, Raja Badung dan Tabanan sedang mempersiapkan rakyat untuk mempertahankan kerajaan dari serangan Belanda. Resolusi Jenderal Gubernur mengenai ekspedisi militer ke Bali telah ditentukan pada tanggal 4 September 1906. Pasukan Belanda tiba di Sanur pada tanggal 12 September 1906 di bawah kepemimpinan Jenderal M. B. Rost van Tonningen dan F. A. Liefrinck. Pada tanggal 16 September 1906 Belanda menganeksasi Puri Denpasar dan Puri Pamacutan dari kapal mereka di lepas Pantai Sanur. Raja Badung, Cokorda Ngurah Made Agung menyadari serangan Belanda sebagai konsekuensi dari kebijakannya yang menolak permintaan Belanda.

Pada tanggal 19 September 1906, Raja Badung memerintahkan upacara kremasi untuk Raja yang sudah wafat yaitu Cokorda Alit Ngurah Pamacutan (Ayah dari I Gusti Alit Ngurah) yang meninggal pada tahun 1902. Pada waktu yang sama ketika bertentangan dengan kebijakan Belanda, terdapat upacara *satia* yang dilakukan oleh seorang perempuan Brahmana. Ida Ayu Supi melemparkan dirinya ke arah api bersama

jasad mendiang Raja. Cokorda Ngurah Made Agung mengambil abu raja dan meletakkannya di atas *destar* (kain kepalanya) yang akan dikenakan pada hari berikutnya yaitu *puputan*. Dengan cara ini, diyakini bahwa perjuangannya dan perjuangan rakyat Badung akan diberikan berkah oleh mendiang Raja. Sementara itu, Belanda mulai menyerang Badung dan mengepung Desa Sanur. Raja Badung, Cokorda Ngurah Made Agung merasa sangat sedih kepada para korban akibat serangan Belanda. Raja sendiri memutuskan untuk melakukan *puputan* pada hari berikutnya. Tujuan *puputan* adalah untuk memperjuangkan kebenaran dan Raja Badung bertanya kepada keluarga puri dan rakyatnya apakah mereka akan ikut serta dalam *puputan*. Keluarga puri dan pengikutnya setuju dan sangat mendukung keputusan raja untuk melakukan *puputan*. (Kraan, 1985 dan Kraan 1993).

Konsep *puputan* memiliki makna politik dan religius. Secara politik, *puputan* bermakna kekalahan tidak diikuti dengan penyerahan namun harus diikuti dengan semangat perang sampai mati. Secara konteks religius, *puputan* bermakna jika manusia terbunuh di perang maka mereka akan masuk surga. Seperti yang diceritakan oleh Ida Cokorda Ngurah Agung, sebelum pergi perang, rakyat Badung akan dipercikkan dengan air suci atau *tirtha pengentas*, sehingga apabila mereka terbunuh maka jiwa mereka akan memasuki “Wisnu Loka”. *Puputan* terjadi di Taensiat yaitu di utara Puri Denpasar pada pukul 11 siang, tanggal 20 September 1906. Rakyat Badung mempertahankan wilayahnya yang dipimpin oleh Gusti Gde Ngurah Denpasar yang kemudian dikalahkan oleh *battalion* kesebelas Belanda. Kematian Raja Denpasar yaitu Cokorda Ngurah Made Agung diartikan sebagai jatuhnya Puri Denpasar yang membuat rakyat Puri Denpasar mundur ke Puri Pamacutan, di mana mereka sekali lagi bertemu dan dikalahkan oleh Belanda. Setelah jatuhnya Puri Pamacutan, kemudian diadakan upacara *mesatia*. Seperti Gusti Gde Ngurah Denpasar sebelum berangkat menghadapi Belanda, Gusti Ngurah Pamacutan memerintahkan agar semua bangunan puri dibakar. Raja Gusti Ngurah Pamacutan kemudian bertemu dengan para punggawa dan keluarga Puri Pamacutan. Terdapat perbedaan bentuk perlawanan di Puri Pamacutan dengan Puri Denpasar. Belanda dikalahkan oleh rakyat Puri Denpasar dengan sangat mudah karena mereka mempertahankan posisi dalam kelompok besar, sehingga *tantara* Belanda dapat memusatkan tembakan pada kelompok tunggal ini. Namun di Puri Pamacutan, rakyat Badung dibagi-bagi menjadi kelompok kecil dan hal ini juga terjadi di Puri Denpasar di mana para pembela juga terdiri dari wanita dan anak-anak (Baca: “Algemeen Verslag van den Staf der Expeditie naar Bali 10 September-30 Oktober 1906”). Kelompok raja terdiri dari banyak orang. Mereka tetap maju untuk menyerang tembakan sejata dari Belanda. Raja Pamacutan, Gusti Ngurah Pamacutan terbunuh dalam serangan ini. Menakutkan wilayah selatan adalah peristiwa berdarah, dan puncaknya adalah *puputan* oleh Raja Badung. Dalam ritual pembunuhan dan bunuh diri berskala besar ini, Raja dan ratusan keluarga berpakaian serba putih, membunuh satu sama lain dan diri mereka di hadapan *tentara-tentara* koloni. Raja meninggal akibat memperjuangkan kebenaran. Para raja dan rakyat mengakhiri masalah dengan cara mereka, secara terhormat, dalam perang *puputan*. Bahkan, munculnya ide-ide tentang pembangunan masalah keamanan dan pertahanan juga tidak terlepas dari pengaruh yang dimainkan oleh Puri Denpasar (Kraan, 1980, 1983, Ardhana, 1991 dan Ardhana, 2013).

### **Makna Otonomi Kerajaan Denpasar dalam Konteks Bangunan Negara-Bangsa**

Hingga kini, meskipun Puri Denpasar (dahulu dikenal dengan Kerajaan Badung) telah kehilangan otonomi politik dalam artian kekuasaan politik sebagai akibat aneksasi

dari pemerintah kolonial Belanda ketika berkecamuknya perang atau Puputan Badung pada tahun 1906, namun eksistensi Puri Denpasar tetap diperhitungkan terutama dalam aspek sosial dan budaya kehidupan masyarakat di Denpasar pada khususnya dan di Bali pada umumnya, dimana sebagian besar penduduknya adalah etnis Bali yang menganut agama Hindu. Ini terbukti dengan keberadaan munculnya perkumpulan kerajaan-kerajaan Nusantara dimana figur puri Denpasar menjadi tokoh sentral yang memainkan peran signifikan dalam aktifitas kemasyarakatan dan kebudayaan pada khususnya. Sejarah mencatat, bahwa peran Puri Denpasar yang pada masa lalu dikenal dengan kerajaan Badung telah terbukti baik sejak perjuangan dan pergerakan nasional, hingga pada masa revolusi sampai pada perkembangan masyarakat Indonesia dewasa ini. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang ahistoris dalam konteks pemahaman mengenai bagaimana misalnya persepsi masyarakat tentang peran dan kontribusi tokoh-tokoh Puri Denpasar dalam perkembangannya hingga saat ini. Peran Puri Denpasar di masa lalu meskipun secara dominan dalam konteks aktifitas politik dan ekonomi, namun sekarang ini lebih tampak dalam aktifitas sosial dan budaya berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang masih dijadikan panutan dalam konteks kearifan lokal masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aspek sosial budaya dalam memiliki peran penting terutama berkaitan dengan terbentuknya masyarakat multibudaya dimana telah menunjukkan peran Puri Denpasar yang memberikan kepada kelompok etnis bukan Bali seperti etnis Jawa, Madura, dan Bugis untuk hidup secara damai secara berdampingan dengan etnis Bali pada masa lalu (Soedjipto Abimanyu, 2014).

Tidak mengherankan, jika pada masa lalu tampak tanah-tanah yang dimiliki kerajaan juga diberikan kepada kelompok etnis non-Hindu seperti etnis Jawa, Madura, Bugis, untuk ditempati. Ini dapat dimengerti karena mereka dipertimbangkan dapat sebagai penjaga benteng kerajaan Denpasar apabila ada serangan dari luar. Akibat kebijakan politik yang dimiliki oleh kerajaan Denpasar ini mengakibatkan munculnya berbagai nama kampung seperti Kampung Bugis, Kampung Jawa, dan Kampung Kepaon pada abad ke-18 dan ke-19. Munculnya kampung-kampung ini turut memberikan kontribusi dalam terjalannya kesatuan dalam ikatan masyarakat di Kepulauan Nusantara, yang melalui proses dinamika sejarah yang cukup panjang yang dimulai dari terbentuknya rute perdagangan rempah-rempah yang membentang dari Indonesia Timur hingga Indonesia Barat, yang pada akhirnya bertemu dengan dinamika perdagangan sutra yang sudah berkembang sejak awal abad-abad masehi yang berkembang dan membentang di daratan Asia sejak ribuan tahun yang lalu. Pada masa lalu, kegiatan aspek ekonomi yang dilakukan kerajaan Denpasar (sebelumnya bernama kerajaan Mengwi dan Badung) dapat dilihat pada peran penting dari perkembangan sejak Kerajaan Badung yang berdiri pada tahun 1770-an. Dinamika masyarakat dan budaya yang terjadi pada kurun waktu sebelum dan seterusnya terutama setelah berdirinya Kerajaan Badung tampak adanya otonomi terutama dalam hal politik yang dimiliki oleh Kerajaan Badung yang kemudian menjadi Puri Denpasar sebagaimana halnya dengan otonomi yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara lainnya seperti Kerajaan Aceh, Kerajaan di Jawa baik Yogyakarta maupun kemudian Kerajaan Surakarta, Kerajaan Gowa, Kerajaan Ternate dan Tidore dan kerajaan-kerajaan lainnya di Kepulauan Nusantara yang semakin berkembang pada abad ke-17 hingga abad ke-18, dimana pada abad-abad itu mulai datangnya pengaruh kedatangan orang Eropa, terutama Portugis dan Spanyol dalam aktifitas ekonomi dan perdagangan.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, meskipun terdapat sentuhan-sentuhan dengan orang-orang Eropa seperti dengan bangsa Spanyol, Portugis, kemudian dengan

Belanda dan Inggris tetapi masalah otonomi politik yang sudah dimiliki oleh kerajaan-kerajaan itu tidak tergoyahkan oleh kedatangan mereka, karena tujuan mereka. Ini artinya bahwa hubungan pada saat itu hanya di bidang perdagangan dan ekonomi. Dengan demikian hubungan antara orang-prang Eropa dengan kerajaan-kerajaan itu bersifat informal dan indirect. Satu contoh aktifitas di bidang ekonomi yang dilakukan misalnya dapat dilihat adanya aktifitas perdagangan, pelayaran dan kegiatan maritim lainnya masih dilakukan dengan bebas (otonomi) oleh masing-masing kerajaan-kerajaan itu. Peran Kerajaan Denpasar (Badung) juga tidak terlepas dari konteks dinamika tersebut, sehingga akibat perkembangan dunia pelayaran dan perdagangan maka memungkinkan ditempatkan seorang subandar di Kuta pada abad ke-19 yang merupakan cikal bakal perkembangan Kuta sebagai pelabuhan di Bali Selatan. Kondisi ini memungkinkan kemudian diangkatnya Mads Johansen Lange, seorang Denmark menjadi subandar di Kerajaan Badung pada abad ke-19. Ini artinya dinamika kerajaan Badung atau Denpasar masih memegang kuat otonominya, meskipun sentuhan-sentuhan politik dengan orang Barat atau Eropa tidak terhindarkan di tahun-tahun berikutnya. Dengan kondisi seperti ini dan adanya keterbatasan yang dimiliki oleh orang Belanda dalam kaitannya dengan sumberdaya manusia, sehingga memungkinkan menjalankan pengaruh atau hubungan dengan mereka secara informal dan indirek. Hal ini yang secara lambat laun memunculkan kebutuhan untuk melakukan perjanjian panjang atau *Lange Verklaring (Long Declaration)* dengan kerajaan-kerajaan lokal yang masih memegang otonominya secara kuat. Akan tetapi, ketika pemerintah kolonial Belanda tidak mampu menyelenggarakan pengaruhnya diakibatkan oleh semakin intensifnya persaingan dengan orang-orang Barat lainnya seperti Inggris misalnya, maka diputuskanlah untuk mengganti pelaksanaan *Lange Verklaring* itu dengan *Korte Verklaring (Short Declaration)* yang intinya adanya pengakuan terhadap posisi Belanda di kepulauan Nusantara (Kraan, 1983).

Namun demikian ini tidak berarti bahwa kerajaan-kerajaan pribumi membiarkan keinginan Belanda itu untuk mendominasi otonomi yang dimilikinya itu. Akan tetapi, sebaliknya muncullah berbagai perlawanan dan perjuangan sebagaimana diawali dengan berkecamuknya Perang Aceh yang dilandasi oleh ideologi Perang Jihad atau Perang di Jalan Allah kemudian diikuti dengan perlawanan-perlawanan lainnya yang di Bali dikenal dengan *Puputan Badung* pada tahun 1906 yang mengandung makna bahwa apabila wafat di medan laga akan memasuki Kresnaloka atau Sorga. Dengan ekspansi militer dan politik akhirnya kekuasaan kolonial Belanda berhasil merampas otonomi politik yang pernah dimilikinya dalam perjalanan sejarah panjang di Bali di masa lalu (Baca juga: Agung, 1985).

## SIMPULAN

Dari deskripsi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan relasi kuasa antara raja dan rakyatnya berdasarkan hubungan raja dan kawula atau rakyat (*patron-client relationship*), ketika kerajaan Denpasar melaksanakan hak otonominya yang dimulai dari awal abad ke-19 dan memasuki awal abad ke-20. Dari penjabaran ini dapat dilihat bahwa konsolidasi kekuasaan imperialisme Eropa di wilayah kekuasaannya merupakan suatu proses yang bertahap. Pada awalnya mereka mengimplementasikan kebijakan politiknya melalui kekuasaan tidak langsung (*indirect*) dan informal atas kepentingan ekonomi dan politik di negeri koloninya. Intervensi langsung dicoba untuk dihindari secara langsung dan formal pada pemerintahan lokal saat itu yang masih memegang otonomi mereka dan masih merdeka. Satu kemungkinan

yang dapat ditempuh saat itu adalah dengan menempatkan seorang pegawai kolonial yang berperanan sebagai penasehat pada suatu jabatan birokrasi kolonial yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan kepentingan pemerintah kolonial. Namun demikian, jika cara ini tidak memberikan solusi maka ditempuh strategi penguasaan baru dengan menerapkan kekuasaan formal dan langsung. Selain itu, adanya peralihan kekuasaan informal ke formal dan munculnya kontestasi politik di antara negara-negara imperialis itu sendiri di tingkat internasional, penyebaran imperialisme Eropa itu secara intensif yang disebabkan oleh perkembangan di daerah koloni sendiri. Inilah yang disebut dengan teori imperialisme yang berorientasi pada pinggiran (*pheryphery*) sebagaimana disebutkan di atas. Hal ini terjadi, ketika sekelompok elit lokal atau ketidakinginan mereka pada kekuasaan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan adanya strategi pemerintah kolonial Belanda untuk menerapkan kebijakan politik formal dan langsung dan sebagai reaksi atas peristiwa di wilayah pinggiran kekuasaan kolonial, telah menyebabkan terjadinya perlawanan sebagaimana dapat dilihat di beberapa kerajaan di Kepulauan Nusantara. Atas dasar kekuasaan kolonial Belanda yang sebagian sudah lama diimplementasikan secara informal dan tidak langsung, kemudian secara berangsur-angsur pada akhirnya diterapkanlah kekuasaan formal dan langsung yang menandakan berakhirnya kekuasaan atau otonomi politik di tangan raja-raja. Meskipun secara politik dapat dikatakan kekuasaan otonomi itu berakhir, namun secara sosial budaya tetap masih dimiliki oleh keturunan raja atau puri yang menjadi modal sosial dan budaya bagi pembertahanan tradisi dan budaya Bali dalam konteks bangunan negara-bangsa di Indonesia sekarang ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abang I. (2016). *Sejarah Kesultanan Melayu Sanggau*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Abdurrachman. (1984). *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Agung, I.C.N. "Lintasan Babad Badung". Paper tidak diterbitkan. (Denpasar, 1983). (Koleksi Puri Satria).
- Agung, I.A.A. G. (1985). *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Agung, I.A.A.G. (1991). *Bali in the 19th Century*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- "Algemeen Verslag van den Staf der Expeditie naar Bali 10 September-30 Oktober 1906", dalam *Indisch Militair Tijdschrift, Extra Bijlage* No. 27. (Officielle Bijdrage van het Department van Oorlog in Nederlandsch-Indie).
- Anderson, B.R. O' G. (1972). "The Idea of Power in Javanese Culture", dalam Claire Holt (ed). *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. (1964). *Surat-surat Perdjangjian antara keradjaan-keradjaan di Bali dan Lombok dengan Pemerintah Hindia Belanda*. Djakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Ardhana, I. K. (2013). "Pandangan Lokal versus Barat tentang Puputan Badung Ekspansi Imperialisme Modern Belanda dalam Konteks Bali", dalam *Jurnal Kajian Bali*, Volume 03, Nomor 01. Denpasar: Pusat Kajian Bali-Universitas Udayana.
- Ardhana, I. K. (1991). "Kerajaan Badung dalam Konteks Kolonial Belanda, 1827—1906". (Laporan Penelitian). Denpasar: Universitas Udayana.

- "Asal-Oesoel dari Tjokorde Ngoerah Agoeng dilahirkan di Denpasar, Landschap Badoeng (Zuid Bali) pada tahun 1921". (The Collection of Puri Satria).
- Barth, F. (1993). *Balinese Worlds*. Chicago: The University of Chicago.
- Bourchier, D. (2010). "Kisah Adat dalam Imajinasi Politik Indonesia dan Kebangkitan Masa Kini" dalam James Davidson, David Henley, Sandra Moniaga. *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Coedes, G. (1968). *The Indianized States of Southeast Asia*. Honolulu: East West Counter Press.
- Creese, Helen. (1992). "The Early Balinese Polity: Interpreting The Evidence", Paper presented at the Ninth Biennial ASAA Conference University of New England, July 6-9.
- Creese, Helen. (1993). "The Problem of The Precolonial Balinese State", Makalah dipresentasikan pada Internasional Conference on Autonomous States in Southeast Asia and Korea at the 34th International Congress for Asian and North African Studies (ICANAS) August.
- Darmiati (et al.). (1998). *Otonomi Daerah di Hindia Belanda, 1903—1940*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Furnivall, J. S. (1934). *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gallagher, John dan Ronald R. (1979). "Der Imperialismus des Freihandels", dalam Hans-Ulrich Wehler. *Imperialismus*. Dusseldorf: Athenaum Verlag GmbH.
- Geertz. C. (1980). *Negara: The Theatre State in Nineteenth Century Bali*. New Jersey: Princeton University Press.
- Gullick, J.M., (1982). "The Condition of Having A Raja: A Review of Kerajaan by A.C. Miiner", dalam *Review of Indonesian and Malayan Affairs*, Vol. 16, No. 2.
- Heine G. R. (1956). *Conceptions of State and Kinship in Southeast Asia*. New York: Southeast Asia Program Department of Asian Studies, Cornell University.
- Hobsbawn, E. and Terence R, (eds.). (1983). *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Klooster, H. A. J. (1985). *Indonesiers Schrijven Hun Geschiedenis: De Ontwikkeling van de Indonesische Geschiedbeoefening in Theorie en Praktijk 1900—1980*. Dordrecht-Holland: Foris Publication.
- Klinken, G. v.(2010). "Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal", dalam James Davidson, David Henley, Sandra Moniaga. *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Korn, V. E. (1924). *Het Adatrecht van Bali*. 's-Gravenhage: N.V. Handelsdrukkerij "De Ster".
- Kraan, A.v.d. (1980). *Lombok: Conquest, Colonization and Underdevelopment 1870-1940*. Singapore: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd.
- Kraan, A.v.d (1983). "Bali: Slavery and Slave Trade", dalam Antony Reid (ed), *Slave, Bondage and Dependency in Southeast Asia*, New York: University of Queensland Press.
- Kraan, A.v.d (1985). "Human Sacrifice in Bali: Sources, Notes and Commentary", dalam *Indonesia*, No. 40. Cornell: Southeast Asia Program. October.
- Kraan, A.v.d (1993). "Trade, Rajas and Bandars in South Bali", dalam John Butcher and Howard Dick (eds.). *The Rise and Fall of Revenue Farming: Business Elites and*

- the Emergence of the Modern State in Southeast Asia, London: The Macmillan Press Ltd.
- Kulke, H. (1986). "The Early and The Imperial Kingdom in Southeast Asian History", dalam David G. Marr and A.C. Milner (eds.). *Southeast Asia in The 9th to 14th Centuries*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Leur, J. C. van. (1955). *Indonesian Trade and Society*. The Hague: Van Hoeve.
- Locher-Scholten, Elsbeth. (1994). "Dutch Expansion in the Indonesian Archipelago around 1900 and the Imperialism Debate", dalam *ISEAS*, Vol 25, 1 (Maret).
- Lansing, J. S. (1983a). *The Three Worlds of Bali*. Princeton: Praeger Scientific.
- Lansing, J.S. 1983b. "The Indianization of Bali", dalam *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 14, No. 2 (March).
- Mommsen, W. J.(1987). *Imperialismus Theorien*. Gottingen: Kleine Vandenhoeck-Reihe.
- Monfries, J. (2018). *Raja di Negara Republik: Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX dari Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Biography.
- Popkin, S. (1979). *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkely University Press.
- Reid, A. (1988). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450—1680*. Yale: Yale University Press.
- Ronkel, P. H. S. (1902). "Dagverhaal van eene Reis van den Resident van Bali en Lombok Vergezeld van den Controleur voor de Politieke Aanrakingen en de Poenggawa's Ida Bagoes Gelgel en Goesti Ktoet Djlantik naar Tabanan en Badoeng", dalam *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land-en Volkenkunde*. s'-Hage: Martinus Nijhoff.
- Scott, J. C., (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale: Yale University Press.
- Schulte N. H. (1980). *Macht, Mensen en Middelen: Patronen van Dynamiek in de Balische Politiek 1700-1840*. Amsterdam: Vrije Universiteit.
- Smail, J. (1961). "On the Possibility of an Autonomous History of Modern Southeast Asia" dalam *Journal of Southeast Asian History*.